

## BAB 3

### OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

##### 3.1.1 Latar Belakang dan Perkembangan Bank BTN

Bank BTN didirikan pada 9 Februari 1950, sebagai Bank Tabungan Pos (BTP), berdasarkan Undang-Undang Darurat No.9 tahun 1950, dan kemudian pada tahun 1963 berubah menjadi Bank Tabungan Negara (BTN).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1968, tugas pokok Bank Tabungan Negara disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan. Seiring dengan dimulainya rencana pembangunan perumahan oleh Pemerintah, pada tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tahun 1989 sesuai surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, Bank Tabungan Negara berubah menjadi Bank Umum. Tanggal 1 Agustus 1992, status hukum Bank Tabungan Negara diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan kepemilikan saham mayoritas oleh pemerintah cq Departemen Keuangan RI. Bank BTN memperoleh status sebagai Bank Devisa mulai 23 September 1994. Pemerintah kemudian pada 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN bertindak sebagai Bank Umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan.

Tahun 2003, Bank BTN bersama dengan konsultan Price Waterhouse Coopers kemudian menyusun kerangka kerja restrukturisasi dan rencana bisnis periode 2003-2007 yang menandai dimulainya proses restrukturisasi secara menyeluruh. Tahun 2008 Bank BTN melanjutkan langkahnya untuk berubah menjadi bank yang fokus pada pembiayaan perumahan sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia.

Visi Bank Tabungan Negara adalah Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. Misi yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara antara lain (1) memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, (2) meningkatkan

keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini, (3) menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi, (4) melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *shareholder value*, (5) mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

Beberapa penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Bank BTN antara lain : (1) *Best of best in housing loan* (KPR) oleh majalah SWA, (2) Bank BUMN yang konsisten membiayai perumahan rakyat kategori Bank Penyalur KPR Inovatif & Berkinerja Terbaik dari majalah *Properti*, (3) *Sharia Acceleration Award* oleh Karim Business Consulting, (4) *2nd Rank in The Most Third Party Fund Expansion Sharia Division – Asset >Rp500* milyar oleh Karim Business Consulting, (5) Menerima sertifikat ISO9001:2000 dari lembaga pemeringkat internasional (SGS). Sertifikat ISO 9001:2000 diberikan kepada satuan Internal Audit Services Bank BTN yang telah memenuhi penerapan manajemen kualitas, baik struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya sehingga layak mendapatkan pengakuan sistem manajemen mutu, (6) *2nd Rank in The Best Sharia Division-Asset > Rp500* milyar oleh Karim Business Consulting, (7) Institut Keuangan, Perbankan dan Informatika Asia Perbanas menganugerahi PT Bank Tabungan Negara (Persero) predikat sebagai bank milik negara paling efisien. (8) Bank yang berpredikat “SANGAT BAGUS” atas kinerja keuangan tahun 2007 dari *InfoBank*, (9) ISO 9001:2000 untuk pemrosesan KPR dan KPA, mulai dari aplikasi sampai penyaluran kredit.

### **3.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Dalam susunan organisasi Bank Tabungan Negara terdapat beberapa komponen. Bagian dari organisasi paling atas adalah rapat umum pemegang saham, yang kemudian untuk operasional perusahaan dipimpin oleh direktur utama dan dibantu oleh beberapa wakil direktur. Pada bagian pengawasan terdapat dewan komisaris yang dibantu oleh beberapa komite yang mendukung kinerja dalam mengawasi operasional bank tersebut. Untuk struktur organisasi perusahaan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 4.

Bank Tabungan Negara memiliki 4154 pegawai yang sebagian besar (43,04%) memiliki gelar sarjana, sebesar 5,01 % memiliki gelar magister, 17,53 % memiliki gelar diploma dan 34,42 memiliki gelar SMA ( Sekolah Menengah Atas).

### **3.1.2.1 Direktur Kepatuhan**

Bank Indonesia dan beberapa pihak regulator lainnya telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai aktivitas perbankan. Dalam kegiatan operasionalnya pihak bank yang ada di Indonesia harus patuh terhadap peraturan / ketentuan yang telah dikeluarkan tersebut untuk meminimalkan resiko yang dapat berdampak kepada reputasi perusahaan dan menghindari biaya tambahan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan / peraturan.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi memantau dan menjaga kepatuhan Bank untuk memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, perundang - undangan serta perjanjian dan komitmen dengan Bank Indonesia yang berlaku. Faktor - faktor risiko kepatuhan di kantor cabang diawasi melalui *check list* kepatuhan dan *check list* manajemen risiko yang disampaikan kepada kantor cabang setiap bulan. Selain itu satuan kerja kepatuhan bersama divisi manajemen risiko memiliki tugas untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dan memantau secara teratur seluruh teknis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan melakukan *review*.

Dalam menjalankan tugasnya direktur kepatuhan dibantu oleh desk kepatuhan. Fungsi dari desk kepatuhan adalah bertanggung jawab atas pemantauan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal. Divisi Kepatuhan juga memastikan bahwa Bank BTN memiliki sistem dan perangkat kerja yang memadai guna menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam rangka program KYC (Know Your Customer) dan Anti Money Laundering. Desk Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Divisi kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Bank BTN telah melaksanakan Pokok-Pokok Penerapan Fungsi Kepatuhan.

### 3.1.3 Produk dan Jaringan Distribusi Bank Tabungan Negara

Bank BTN memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain: (1) Produk dana yang berupa tabungan, giro, deposito; (2) Jasa dan layanan perbankan; (3) Produk kredit; (4) Produk dana BTN syariah; (5) Produk pembiayaan BTN syariah.

Jaringan distribusi yang dimiliki oleh Bank BTN dalam memberikan produk dan layanan jasa perbankan kepada masyarakat terdiri dari : (1) 60 kantor cabang, (2) 182 kantor cabang pembantu, (3) 16 kantor cabang syariah, (4) 69 kantor layanan syariah, (5) 1545 kantor pos online, (6) 367 mesin ATM, (7) sekitar 12.000 ATM link dan ATM bersama.

## 3.2 Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang

Pada bab sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana seseorang pelaku melakukan tindakan pencucian uang baik metode yang mereka gunakan, media yang digunakan antara lain, institusi keuangan seperti bank, pedagang valuta asing, pasar modal, dan lainnya.

Fokus pembahasan dalam karya tulis ini pada institusi perbankan karena institusi perbankan merupakan tempat yang paling sering digunakan oleh para pelaku pencucian uang. Pencegahan / pendeteksian awal perlu dilakukan oleh institusi perbankan terhadap adanya potensi kemungkinan terjadinya tindakan pencucian uang. Pihak perbankan perlu mengetahui karakteristik ekonomi dari para nasabahnya atau yang dikenal dengan *Know Your Customer Policy ( KYC )* , dan juga menentukan transaksi yang termaksud ke dalam transaksi keuangan yang mencurigakan.

### 3.2.1 *Know Your Customer Policy*

Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, pihak bank harus mengetahui profil ekonomi dari nasabah mereka dan tujuan dari transaksi tersebut, sehingga pihak bank dapat memperkirakan aktivitas normal dari nasabah mereka. Tahap

selanjutnya pihak bank mengambil kesimpulan apakah transaksi yang dilakukan oleh pihak nasabah tersebut diluar dari profil aktivitas ekonomi yang mereka lakukan secara wajar.

Dalam melakukan kebijakan *Know Your Customer* ini pihak bank harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah, dan jika nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, maka identitas pihak lain tersebut juga diminta dan diverifikasi dan hal yang perlu diperhatikan adalah masa berlaku dari dokumen tersebut dan pihak yang berhak mengeluarkan dokumen tersebut. Pihak bank harus memiliki salinan atas dokumen tersebut.

Pihak bank wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya agar pihak bank memiliki informasi yang handal mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut apakah menyimpang dari profil ekonomi nasabah bank tersebut, yang jika terdapat penyimpangan maka pihak bank dapat mengidentifikasi transaksi tersebut dalam transaksi yang mencurigakan yang kemudian dapat dilaporkan kepada PPATK.

### **3.2.2 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Sebagai tindakan awal untuk mencegah dana yang berasal dari sumber penerimaan yang tidak sah dapat masuk kedalam institusi keuangan, langkah awal dari penyedia jasa keuangan tersebut dengan melakukan *know your customer policy* seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, yang dapat mengidentifikasi profil nasabah yang ada di bank tersebut, jika kemudian terjadi suatu transaksi yang menyimpang dari profil nasabah tersebut, maka pihak bank dapat menggolongkan transaksi tersebut ke dalam transaksi keuangan mencurigakan.

Menurut undang – undang tindak pidana pencucian uang, kewajiban melapor para penyedia jasa keuangan terhadap PPATK adalah untuk hal – hal yang terkait transaksi keuangan mencurigakan. Laporan ini paling lambat diserahkan tiga hari kerja, setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan.

Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000 ( lima ratus juta rupiah ) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan sekali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Laporan ini paling lambat diserahkan 14 hari kerja setelah transaksi tersebut dilakukan.

Jika penyedia jasa keuangan tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, akan dikenakan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

Orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000 atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melapor ke Dirjen Bea dan Cukai, yang kemudian Dirjen Bea dan Cukai melaporkan informasi yang diterima dalam jangka waktu lima hari. Jika orang yang membawa uang tunai sejumlah Rp.100.000.000 atau lebih tidak melapor, maka akan dikenakan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.300.000.000.

Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan kepada PPATK bersifat rahasia, dan sumber pemberi laporan tersebut wajib dirahasiakan dalam persidangan, kecuali laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut digunakan untuk tujuan yang telah diatur dalam undang – undang.

### **3.3 Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian dibagi menjadi dua kelompok yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis.

#### **3.3.1 Metode Pengumpulan Data**

Pada karya akhir ini metode penelitian yang dilakukan melalui studi literatur mengenai tindak pencucian uang, analisis dan desain sistem informasi. Termaksud dalam teknis analisis dan perancangan adalah teknik pemodelan sistem informasi seperti *data flow diagram* dan *document flow serta program flow*. Selain dengan menggunakan studi literatur pada penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan pemahaman atas sistem informasi yang berjalan pada Bank Tabungan Negara untuk penerapan KYC ( *Know Your Customer* ) .

### 3.3.2 Metodologi Analisis

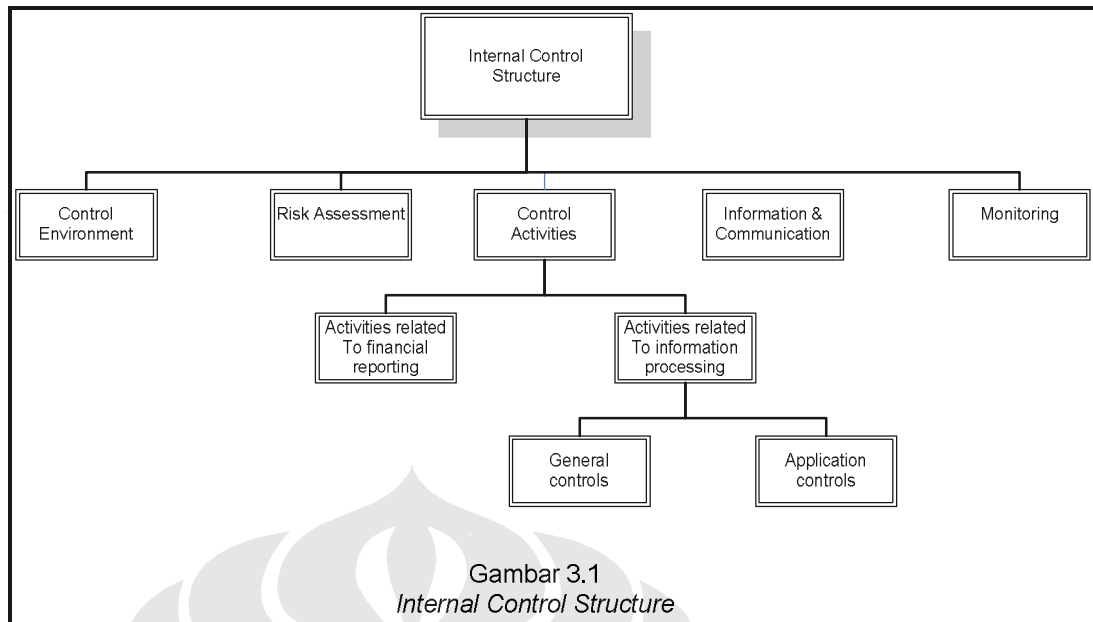
#### 3.3.2.1 Metode Analisis Sistem

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *FAST*, yang mana dalam metode ini terdapat dua bagian yaitu metode analisis dan metode perancangan sistem informasi. Pada metode analisis *FAST* terdiri dari tiga langkah antar lain :

- a. Investigasi awal : Pada tahap ini dilakukan identifikasi beberapa masalah dan peluang yang ada dalam operasional pelaksanaan sistem *know your customer* (KYC).
- b. Analisis Masalah : Dari masalah dan peluang yang dihadapi oleh PPATK kemudian dalam tahap analisis masalah, akan dilakukan penelitian atas sistem informasi yang sedang berjalan. Penemuan dalam penelitian tersebut dapat lebih memberi pemahaman akan masalah dan peluang yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- c. Analisis kebutuhan : Pada tahap analisis kebutuhan ini, dilakukan identifikasi persyaratan aktivitas apa yang harus dimiliki oleh sistem tersebut.
- d. Desain logikal : pada tahapan ini, desain logikal atas kebutuhan bisnis / aktivitas menggunakan teknik *structured analysis* untuk menggambarkan pemodelan proses.

#### 3.3.2.2 Metode Analisis Pengendalian Internal Sistem KYC

Sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan akan berjalan dengan baik, jika terdapat suatu ketentuan pengendalian internal yang baik. Kendali internal yang baik dapat membantu sistem tersebut untuk berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan. Pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis atas kendali internal dalam penerapan sistem KYC (*Know Your Customer*) pada Bank BTN. Analisis penerapan sistem kendali internal berdasarkan beberapa kriteria yang dikeluarkan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organization*).



Gambar 3.1 Internal control structure

( Sumber : Wilkinson, Cerullo, Raval, Wong on Wing, Accounting Information System )

### 1. Lingkungan kendali.

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan pemilik suatu entitas mengenai pentingnya pengendalian internal. Dalam komponen lingkungan kendali ini terdapat beberapa subkomponen yang perlu diperhatikan.

- Integritas dan nilai – nilai etis. Hal ini merupakan produk dari standar tingkah laku dan etis suatu entitas dan bagaimana mereka mengkomunikasikan dan diperkuat dalam praktek.
- Komitmen untuk kompetensi. Komitmen untuk kompetensi meliputi pertimbangan manajemen akan tingkat kompetensi untuk pekerjaan khusus dan bagaimana tingkat tersebut dapat diterapkan ke dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
- Partisipasi dewan direksi atau komite audit. Dewan direksi yang efektif adalah tidak terikat pada manajemen, dan anggotanya dilibatkan dalam memantau aktivitas manajemen.



- Filosofi dan gaya operasional manajemen. Manajemen melalui aktivitasnya , menyediakan isyarat yang jelas kepada karyawan tentang pentingnya pengendalian internal.
- Struktur organisasi. Struktur organisasi entitas menggambarkan bentuk tanggungjawab dan otoritas yang ada.
- Penugasan dan otoritas tanggungjawab. Metode formal komunikasi tentang otoritas dan tanggung jawab.
- Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personil. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya maka pengendalian internal dapat berjalan efektif.

## **2. Penilaian resiko**

Mengidentifikasi dan menganalisis resiko adalah suatu proses yang berkelanjutan dan suatu komponen kritis dalam pengendalian internal yang efektif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor yang dapat meningkatkan resiko, kemudian pihak manajemen menilai kemungkinan terjadinya resiko tersebut, dan mengembangkan tindakan spesifik yang perlu diambil untuk mengurangi resiko pada tingkatan yang bisa diterima. Terdapat tiga kriteria dalam penilaian resiko menurut COSO :

- Mengestimasi pentingnya resiko
- Menilai kemungkinan atau frekuensi munculnya resiko.
- Mempertimbangkan bagaimana resiko harus dikelola dan menilai tindakan apa yang harus diambil.

## **3. Aktivitas pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu, telah diambil untuk mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas tersebut. Pada penelitian ini, aktivitas pengawasan lebih ditekankan kepada aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan informasi, karena ketika sistem KYC tersebut berjalan, jika terdapat

pengendalian yang baik pada proses atas data input yang dapat diandalkan maka diharapkan sistem tersebut dapat menghasilkan suatu *output* yang baik dan tepat sebagai dasar pemilihan keputusan. Aktivitas pengendalian yang berkaitan dengan proses informasi ini terbagi menjadi dua :

*1. General controls ( pengendalian umum )*

- Kendali organisasi ( Organizational controls ).
- Pengendalian dokumentasi ( Documentation controls ).
- Pengendalian pertanggung jawaban Aset ( *Asset accountability controls* ).
- Pengendalian tindakan manajemen ( Management practice controls ).
- Pengendalian pusat informasi ( Information center operations control ).
- Pengendalian persetujuan ( Authorization controls ).
- Pengendalian pemakaian ( *access control* ).

2. Application Controls ( Pengendalian aplikasi )

Tujuan dari pengendalian aplikasi secara umum adalah untuk membantu memastikan bahwa seluruh transaksi telah dengan sah disetujui dan secara akurat tercatat, digolongkan, diproses dan dilaporkan.

**4. Informasi dan komunikasi**

Informasi harus dapat diidentifikasi, diolah, dan dikomunikasikan, sehingga personel yang memiliki tanggung jawab dalam hal tertentu dapat menjalankan tugasnya. Dengan informasi yang relevan, pihak Bank BTN dapat menghasilkan suatu keputusan yang efektif dalam menghadapi indikasi tindak pencucian uang.

## 5. Pengawasan

Aktivitas pengawasan merupakan penilaian berkala atau berkelanjutan dari kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah beroperasi seperti yang diharapkan. Pada proses pengawasan ini dilakukan evaluasi untuk memodifikasi apakah sistem pengendalian internal yang ada sudah sesuai dengan perubahan kondisi yang ada. Terdapat tiga jenis pemantauan, yaitu :

- Pemantauan yang berkelanjutan.
- Pengevaluasian manajemen yang terpisah, melalui mekanisme pemantauan kepatuhan yang tersentralisasi maupun terdesentralisasi.
- Pemeriksaan internal atau eksternal yang secara independen menguji kepatuhan dan pengendalian lain untuk menentukan apakah telah dijalankan secara efektif atau belum.